

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana yang ditaati oleh Kecamatan Patumbak merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengatur pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai pemilahan sampah berbahaya, aturan pembuangan sampah yang aman dan sesuai dengan standar lingkungan.

Kecamatan Patumbak dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Pada Bab VI Lembaga Pengelola Sampah Pasal 25 ayat 3. Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan atau Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mempunyai tugas : a. mengordinir serta mengawasi lembaga pengelolaan sampah dari tingkat dusun sampai tingkat desa; b. menyediakan alat angkut sampah serta mengordinir pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*); c. memfasilitasi serta membentuk bank sampah sektoral di Kecamatan; d. mengusulkan kebutuhan TPS/TPS 3R atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ke lembaga pengelolaan sampah tingkat Kabupaten.¹

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) di tahun 2021. Kabupaten Deli Serdang menghasilkan timbulan sampah tahunan sebesar 408,129.86 Ton dengan Timbulan Sampah Harian 1,118.16 Ton.² Untuk mengurangi timbulan sampah yang terjadi pada Kabupaten Deli Serdang dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dengan menimbang beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam serta pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
- c. Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

² <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> diakses 5 Mei 2023

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kamus Istilah Lingkungan, 1994). Sampah padat dari pemukiman merupakan bagian terbesar dari sampah yang timbul di Indonesia. Pemerintahan bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena hal lain yang harus diprioritaskan dan kurangnya dana, di beberapa tempat pengumpulan ulang oleh pemerintah tidaklah tuntas. Di sisi lain masyarakat juga bertanggung jawab dalam membuang sampahnya secara benar pada suatu tempat pengumpulan dan menjalin suatu kerja sama dengan pemerintah. Cara pembuangan sampah selama ini di daerah perkotaan, sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke *landfill* atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang. Akibat perbedaan gaya dan standar hidup rumah tangga kota umumnya menghasilkan sampah lebih banyak dibanding rumah tangga pedesaan. Komposisinya juga berbeda, sebab lebih banyak barang yang dibungkus dengan berbagai kemasan, dan karenanya akan lebih banyak plastik yang dibuang. Sedangkan di desa terpencil, kemungkinan tidak ada pengumpulan

ulang sampah oleh pemerintah secara formal. Sampah, yang umumnya mengandung lebih banyak bahan organik, biasanya dibuang atau dibakar bersama daun-daunan dan sampah lain di halaman belakang rumah. Karena modernisasi barang-barang yang terdiri dari bahan anorganik sampai juga ke daerah pedesaan sehingga komposisi sampah juga berubah. Beberapa barang seperti baterai jika dibakar di tempat terbuka atau dibuang di sembarang tempat dapat menimbulkan bahaya besar.³

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.⁴

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume timbulan sampah di Indonesia pada 2022 mencapai 19,45 juta ton. Angka tersebut menurun 37,52% dari 2021 yang sebanyak 31,13 juta ton. Menurut jenisnya, mayoritas timbulan sampah nasional pada 2022 berupa sampah sisa makanan dengan proporsi 41,55%. Kemudian sampah plastik berada di urutan kedua dengan proporsi 18,55%. Sebanyak 13,27% sampah di Indonesia pada 2022 berupa Kayu/ranting, 11,04% sampah kertas/karton, dan sampah logam 2,86%. Ada pula 2,54% sampah kain, sampah kaca 1,96%, sampah karet/kulit 1,68%, dan 6,55% sampah jenis lainnya. Berdasarkan provinsinya, timbulan sampah

³ Tasrial. *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Malang: Indah Offset. 1998)

⁴ Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2009).

terbanyak pada 2022 berasal dari Jawa Tengah, yakni 4,25 juta ton atau 21,85% dari total timbulan sampah nasional. Posisinya diikuti oleh DKI Jakarta dengan total timbulan sampah 3,11 juta ton, Jawa Timur 1,63 juta ton, dan Jawa Barat 1,11 juta ton. Timbulan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.⁵

Paparan di atas menunjukkan pada kita penting untuk memaparkan atau meneliti tentang pengelolaan sampah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Deskriptif Kualitatif di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang?

1.3.. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Pembatasan masalah dibuat untuk memusatkan penelitian dan mengerucutkan pokok-pokok masalah yang

⁵ Cindy Mutia Annur. 2023. RI Hasilkan 19 Juta Ton Timbulan Sampah pada 2022, mayoritas Sisa Makanan. Diakses tanggal 25 April 2023 dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan/>

ditemukan peneliti pada identifikasi masalah.⁶ Untuk membatasi pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Patumbak dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah, yang difokuskan pada sampah Organik dan Anorganik.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Patumbak, di wilayahnya dalam menyelesaikan tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah Organik dan Anorganik.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penulis Berharap Penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1) Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai referensi ataupun karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada pentingnya

⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*" (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 207.

pengelolaan Sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

2) Secara Praktis

- a. Bagi Kantor Kecamatan Patumbak sebagai informasi dan masukan dalam pengurangan dan penanganan sampah di wilayahnya kedepannya;
- b. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan memahami aturan-aturan yang harus ditaati bersama untuk masyarakat dalam mengelola sampahnya sendiri;
- c. Bagi Penulis untuk menambah pengetahuan serta pengalaman sebagai bekal terjun ke masyarakat, dan memahami teori/konsep tentang Implementasi kebijakan.

1.5. Kerangka Teori

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian (kualitatif) adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian.⁷ Adapun teori-teori yang mendasari penelitian ini adalah :

1.5.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. *Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of*

⁷ Ibid; hal. 52

important executive orders or court decisions. Menurut Jones (1987) implementasi merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan, dan dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Menurut Udoji, (1981) Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan.

Berdasarkan uraian di atas mengapa implementasi sangat penting karena penerapan dimasyarakat sangat berpengaruh adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan melalui cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Untuk melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level bureaucracy (lipsky)* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. Maka mengapa implementasi sangat penting adalah :

- a. Tanpa implementasi kebijakan tak akan bisa mewujudkan hasilnya;
- b. Implementasi bukanlah proses yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan rumit;
- c. Benturan kepentingan antar aktor baik administrator, petugas lapangan, maupun sasaran sering terjadi;
- d. Selama implementasi sering terjadi beragam interpretasi atas tujuan, target maupun strateginya;
- e. Implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, baik variabel individual maupun organisasional;

- f. Dalam prakteknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi;
- g. Banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan telah memunculkan kajian baru dalam studi kebijakan yaitu studi implementasi kebijakan;
- h. Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan maka dilakukan evaluasi kebijakan.⁸

Model Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III, dalam *“Implementing Public Policy”*, 1980) Implementasi kebijakan adalah tahap perumusan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.⁹

Menurut George C Edwards III, untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas, terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan keempat faktor tersebut, yakni: komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan) atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

⁸ Intan Fitri Meutia. *Analisa Kebijakan Publik*. (Bandar Lampung:CV. Anugrah Utama Raharja. 2017)

⁹ Awan Y, Abdoellah, Yudi Rustiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. (Bandung: CV. Alfa Beta. 2016)

1. Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Oleh karena itu, syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat dan dipahami.

2. Sumber-sumber

Agar implementasi kebijakan efektif, maka sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik, meliputi staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik, yakni: staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas.

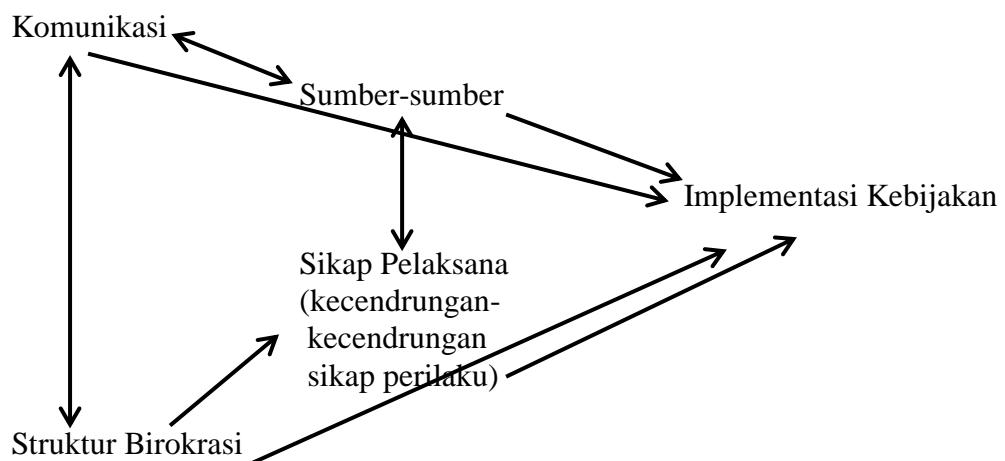
3. Sikap Pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap perilaku)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, berarti mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, ini berbicara tentang dampak, baik positif maupun negative, sangat tergantung pada kecenderungan sikap perilaku pelaksana kebijakan. Hal yang mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan birokrat dan beberapa insentif.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Walaupun demikian, faktor struktur birokrasi dalam pelaksanaannya menghadapi dua faktor yang memungkinkan terhambatnya fungsi struktur birokrasi, yakni faktor internal, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar (*standard operating procedures-SOP*) dan faktor eksternal, yakni fragmentasi-fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar unit pejabat eksekutif dan faktor eksternal lainnya.

Gambar 1. Dampak langsung dan tidak langsung pada implementasi kebijakan



1.6. Kerangka Berfikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁰

Kecamatan Patumbak, selaku penggerak adanya kegiatan pengolahan sampah sesuai mandat di Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yang harus memberi arahan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin. Juga memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penunjang agar terjadinya pengolahan sampah yang baik ditengah maraknya pembuangan sampah sembarangan yang terjadi khususnya di Kecamatan Patumbak. Pengelolaan sampah yang sedang terjadi di Kecamatan Patumbak, haruslah berkualitas dan berguna untuk masyarakat Kecamatan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori George C. Edwards III, fungsi teori tersebut yaitu menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Patumbak yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi, dapat didefinisikan pada penelitian ini yaitu:

¹⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*" (Bandung: Alfabeta, 2013)

- a. Transmisi yang dimaksudkan adalah bagaimana penyaluran peraturan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan agar mengetahui peraturan yang dibuat;
- b. Konsistensi yaitu bagaimana pembuat peraturan atau program dalam menjaga program tersebut dilaksanakan secara terus menerus dalam menjalankannya; dan
- c. Kejelasan yaitu peraturan atau program haruslah jelas tujuan dan mudah dalam memahaminya untuk pelaksana program tersebut.

2. Faktor Sumber-sumber, dapat didefenisikan pada penelitian ini yaitu:

- a. Sumber daya manusia adalah mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan baik dikantor maupun di lapangan yang memiliki pengalaman dalam bidang yang dikelola;
- b. Sumber daya anggaran, karena terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah; Dan
- c. Sarana dan prasarana, adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3. Faktor Sikap Pelaksana (kecenderungan-kecenderungan sikap perilaku) dapat didefenisikan pada penelitian ini yaitu:

- a. Komitmen, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap aparatur mesti dilandasi oleh komitmen serta kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kejujuran, pelaksana kebijakan berkewajiban untuk menerima, mendengarkan, dan mengapresiasi aspirasi, keluhan dan/ atau pengaduan yang disampaikan masyarakat.
 - c. Sifat demokratis dalam konteks kebijakan, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintahan Pusat maupun di pemerintahan Daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.
4. Faktor Struktur Birokrasi, dapat didefenisikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
- a. *Standar Operasional Prosedur (SOP)* atau Prosedur kerja adalah Keberhasilan proses pengawasan ditentukan oleh ketersediaan dan kejelasan standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam *Standard Operating Procedure (SOP)*. Dalam konteks kebijakan untuk sektor publik, Standar mutu pelayanan administratif dari *producer view* ditetapkan berbasis peraturan perundang-undangan,

kebijakan, prosedur operasi baku atau SOP (*Standard Operating Procedure*), SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal);

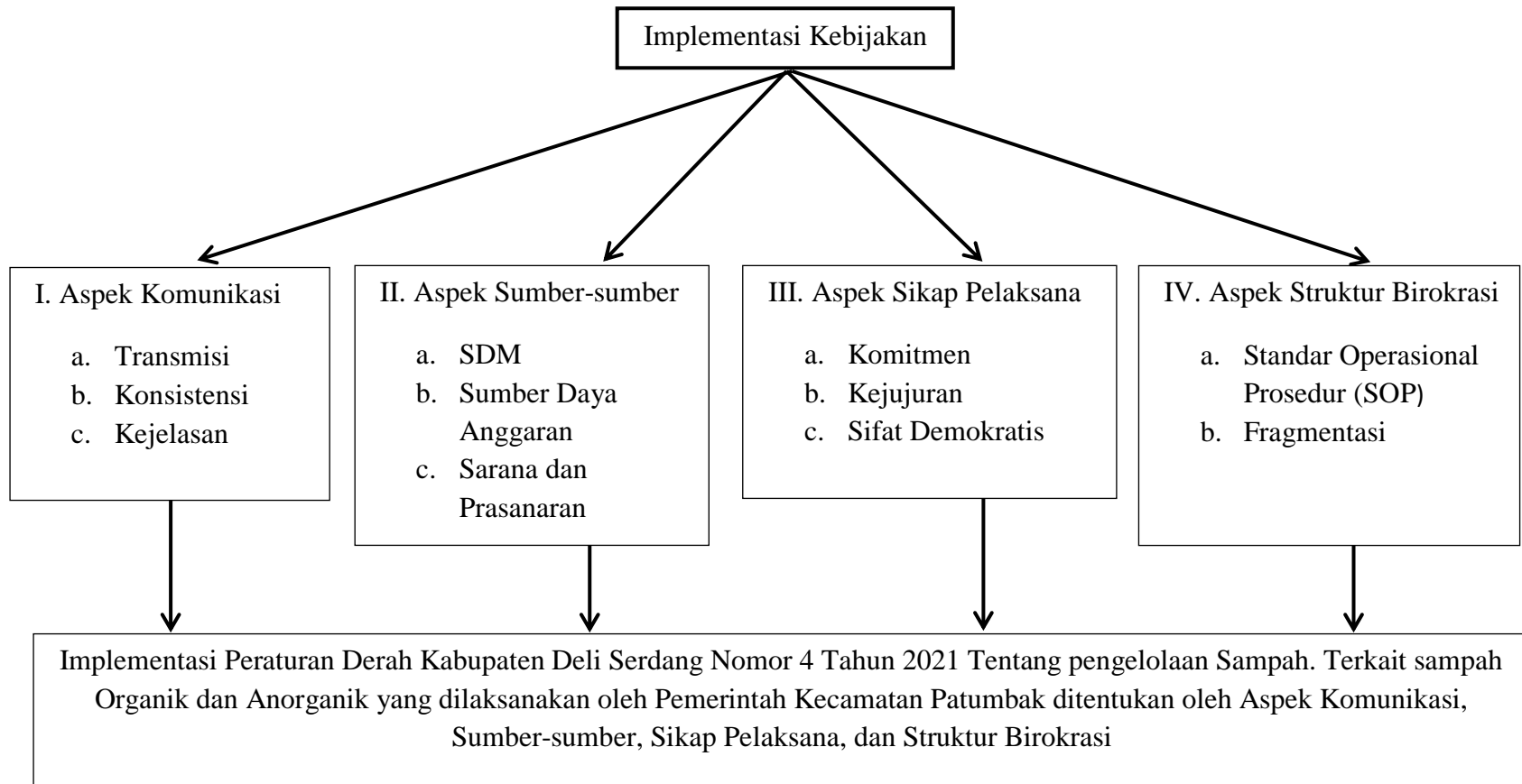
- b. Fragmentasi adalah pelaku yang lebih banyak dalam pelayanan publik, menuntut komitmen mutu yang jelas dan tegas menurut tingkatan dimana kewenangan dibuat. Komitmen mutu berada dalam tiga tingkatan, yaitu komitmen pada level organisasi yang menetapkan nilai publik dan komitmen pemerintah untuk kualitas berdasarkan permintaan pelanggan dan mendukung partisipasi publik (*customer based quality*).

Teori George C. Edwards III ini digunakan dengan alasan karena teori tersebut membantu peneliti mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kecamatan Patumbak terhadap pengelolaan sampah di kawasannya.

Berdasarkan paparan diatas maka proposisi pada penelitian ini ialah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah. Terkait sampah Organik dan Anorganik di Kecamatan Patumbak ditentukan oleh aspek komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Patumbak. Pada penelitian ini peneliti melihat kualitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di lapangan dan dirasakan oleh masyarakat dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif. Berikut adalah skema kerangka fikir penelitian yaitu sebagai berikut :

Gambar 2. Skema Kerangka Pikir Penelitian berdasarkan teori George C Edward III



1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses berfikir sistematis dan kritis, berupa penalaran, logika, serta argumen yang kuat dan benar dengan aturan tertentu untuk memecahkan masalah. Kebenaran ilmiah: hasil penalaran, logika, tradisi dan otoritas ilmu dapat diterima bila telah diuji kebenarannya dengan observasi sistematis atau eksperimentasi.¹¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Misal: penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Penelitian deskriptif ini hanya menggambarkan obyek penelitian, menggunakan analisis kualitatif dan tanpa pengujian hipotesis.¹² Berdasarkan teori tersebut penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran masalah yang diteliti, yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan.

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian akan dilakukan dengan mencari data dan fakta serta mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Patumbak mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang terjadi diawasannya, dengan berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021.

¹¹ Siti Aisyah Tri Rahayu. “*Metode Penulisan Ilmiah*” (Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press. 2019)

¹² Ibid; hlm. 15.

1.7.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2023 sampai Oktober 2023.

1.7.3. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu : Informan Kunci, Informan Utama, Informan Pendukung. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif sepenuhnya ditentukan oleh peneliti, sehingga Patton (2002) menyebutnya dengan *purposive sampling*, yaitu memilih kasus yang informatif berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi.¹³ Informan penelitian dipilih secara teknik *purposive sampling* yaitu sebagai berikut:

1. Camat Patumbak dijadikan informan kunci;
2. Kasi Kebersihan Kecamatan Patumbak dijadikan informan utama;
3. Staf Kebersihan Kecamatan Patumbak dijadikan informan utama;
4. Kepala Desa di Kecamatan Patumbak dijadikan informan utama;
5. Masyarakat sebagai informan pendukung.

Pemilihan informan melalaui teknik *criterion sampling*. Bertujuan mendapatkan informan/kasus yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Metode bertujuan untuk mengetahui kualitas/mutu suatu obyek yaitu sebagai berikut.

¹³ Ade Heryana. 2018. "*Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif*".

1. Camat Patumbak dijadikan Informan Kunci karena beliau adalah sumber informasi secara umum dan orang yang memahami secara konseptual setiap yang ada di Kantor Kecamatan Patumbak;
2. Kasi Kebersihan Kecamatan Patumbak beserta staffnya dan kepala desa di Kecamatan Patumbak dijadikan informan Kunci, karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah di Kecamatan Patumbak;
3. Staf Kebersihan Kecamatan Patumbak dijadikan informan Kunci, karena mereka yang melaksanakan pengelolaan sampah di lapangan.
4. Masyarakat sebagai informan pendukung, karena mereka yang merasakan kualitas implementasi kebijakan Kecamatan Patumbak khususnya dalam hal pengelolaan sampah.

Melalui teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini diperoleh informan yang akan membantu mendapatkan data dan informasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Data Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Nomor Informan
1	Camat Patumbak	Informan Kunci	1
2	Kasi Kebersihan Kecamatan Patumbak	Informan Utama	2
3	Staf Kebersihan Kecamatan Patumbak	Informan Utama	3
4	Kepala Desa di Kecamatan Patumbak	Informan Utama	4
5	Masyarakat Kecamatan Patumbak	Informan Pendukung	5-20

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bila mana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sarna secara serermpak. Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu mengamati langsung kelapangan, peneliti bisa mendapatkan hal-hal yang tidak akan terungkap oleh responden pada wawancara sehingga memperoleh kesan pribadi, dan merasakan suasana sosial yang diteliti.¹⁵

Data yang diobservasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek komunikasi antara lain transmisi, kejelasan dan konsistensi;
2. Aspek Sumber-sumber antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sarana prasaran;

¹⁴ J.R. Raco. "Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya". (Jakarta. PT.Grasindo. 2010).

¹⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*" (Bandung: Alfabeta, 2013)

3. Aspek sikap pelaksana antara lain komitmen, kejujuran dan sifat demokratis;
4. Aspek struktur birokrasi antara lain *standard operating procedure (SOP)* dan fragmentasi.

Observasi terdiri dari : observasi partisipatif, observasi terstruktur dan tersamar, dan observasi tak terstruktur.

Observasi partisipatif merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan alamiah dari objek.

Dalam teknik pengumpulan data observasi di penelitian ini, data yang dimaksudkan adalah peneliti menggunakan jenis teknik observasi partisipatif dimana peneliti mengamati langsung pengelolaan sampah di Kecamatan Patumbak, serta mewawancarai langsung masyarakat karena masyarakat berperan secara langsung dan tidak langsung terjadinya timbulan sampah di Kecamatan Patumbak. Dengan menggunakan observasi partisipatif ini peneliti dapat membuat skema/bagan mekanisme pengelolaan sampah di Kecamatan Patumbak.

b. Wawancara

Wawancara mendalam atau *in depth interview* memiliki posisi yang penting dan strategis dalam penelitian kualitatif. Hampir semua penelitian kualitatif di semua bidang dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah bertemunya dua orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan atau bertukar informasi sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut. Proses wawancara dapat dilakukan dalam kondisi

formal dan diketahui oleh kedua belah pihak atau juga dalam kondisi sangat tidak format, seperti perbincangan biasa sehari-hari karena setting alamiah inilah yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif. Ada tiga macam wawancara dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara tak terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara terstruktur.¹⁶

Dalam wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara formal, ketat pada aturan wawancara, dan sesuai panduan wawancara yang telah dibuat. Pada wawancara terstruktur ini peneliti tidak boleh melakukan wawancara yang keluar dari tema penelitian yang sudah dibuat. Peneliti harus melihat dan memberikan pertanyaan yang sama seperti yang ada di pedoman wawancara.¹⁷ Wawancara tetap mempedomani aspek Implementasi Kebijakan yaitu:

1. Aspek Komunikasi
2. Aspek Sumber-sumber
3. Aspek Sikap Pelaksana
4. Aspek Struktur Birokrasi

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang atau hasil dari proses pendokumentasian. Sementara itu pendokumentasian adalah teknik pengumpulan data atau proses untuk mengambil data dokumentasi. Dokumentasi sendiri berarti catatan atas peristiwa masa lalu. Dokumentasi tersebut dapat berupa laporan perusahaan,

¹⁶ Sigit Hermawan, Amirullah. "METODE PENELITIAN BISNIS Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif". (Malang, Tim MNC Publishing, 2016)

¹⁷ Ibid; hlm. 179

laporan keuangan, foto-foto kegiatan, catatan harian, buku besar, *company profile*, atau data yang lainnya yang terkait dengan tema penelitian. Cara pendokumentasian atas data dokumen dapat dilakukan dengan memfoto kopi data baik *hard copy* ataupun *soft copy*, Data dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti akan lebih memperkuat data wawancara, observasi dan bahkan *Focus Group Discussion* (FGD).¹⁸

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

¹⁸ Ibid; hlm. 180

¹⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*" (Bandung: Alfabeta, 2013)

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.²⁰

Data yang direduksi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Komunikasi antara lain transmisi, kejelasan, konsistensi;
- b. Aspek Sumber-sumber antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan saran prasarana;
- c. Aspek Sikap Pelaksana antara lain komitmen, kejujuran dan sifat demokratis;
- d. Aspek Struktur Birokrasi antara lain *standard operating procedure (SOP)* dan fragmentasi.

1. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*".

²⁰ Ibid; hlm. 247

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²¹

Data yang disajikan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek Komunikas antara lain transmisi, kejelasan, dan konsistensi;
- b. Aspek Sumber-sumber antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sarana prasarana;
- c. Aspek Sikap Pelaksana antara lain komitmen, kejujuran, sifat demokratis;
- d. Aspek Struktur Birokrasi antara lain *standard operating procedure (SOP)* dan fragmentasi.

2. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Terkait pengelolaan sampah organik dan anorganik di Kecamatan Patumbak.

1.7.6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.²²

²¹ Ibid; hlm. 249

²² Ibid; hlm. 268

Untuk mengetahui kredibilitas data pada penelitian ini, menggunakan triangulasi. seperti yang dikemukakan (Wiliam Wiersma, 1986) “*Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures*”. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan dernikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.²³

Triangulasi dipakai pada penelitian ini adalah *triangulasi* teknik pengumpulan data, Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sarna dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan mewawancarai informan, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Agar dalam penelitian ini dapat terarah dan sistematis, peneliti menggunakan

²³ Ibid; hlm. 273

sistematika penulisan yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka berpikir, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab II terdiri atas pembahasan tentang Kosep Implementasi, Konsep Implementasi Kebijakan, Konsep Ekologi Pemerintahan, Konsep Sampah, Konsep Pengelolaan Sampah, dan Kajian Terdahulu

BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab III terdiri atas deskripsi lokasi penelitian yang diuraikan menjadi lokasi penelitian. Seperti Sejarah, Profil dan lain sebagainya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab IV terdiri atas hasil penelitian dan analisa data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Patumbak dengan menggunakan analisis data deskriptif metode kualitatif.

BAB V : PENUTUP

Bab V terdiri atas kesimpulan dan saran yang diperoleh setelah analisa. Hasil dari analisa, akan dirangkum secara keseluruhan dan memberikan beberapa kesimpulan dan saran pada Pemerintah Kecamatan Patumbak dan Masyarakatnya terhadap Pengelolaan Sampah yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu penelitian kualitatif jauh lebih sulit dari penelitian kuantitatif, karena peneliti kualitatif harus berbekal teori yang luas sehingga mampu menjadi "*human instrumen*" yang baik.

Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang diteliti yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Bila peneliti tidak memiliki wawasan yang luas, maka peneliti akan sulit membuka pertanyaan kepada sumber data, sulit memahami apa yang terjadi, tidak akan dapat melakukan analisis secara induktif terhadap data yang diperoleh.²⁴

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Patumbak. Sangat berhubungan dengan teori-teori yang digunakan para ahli ilmu administrasi publik, ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya.

²⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*" (Bandung: Alfabeta, 2013),

Dengan adanya teori, maka memungkinkan hasil penelitian yang dilakukan dapat mencapai hasil optimal. Untuk itu, dalam deskripsi teori ini, peneliti akan menuliskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

2.1. Konsep Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.²⁵

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

²⁵ Syauckani, dkk, 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004) hlm. 295

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.²⁶

Syukur mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

1. adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
2. target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
3. unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.²⁷

Implementasi melibatkan usaha dari pembuat kebijakan untuk memengaruhi, memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan

²⁶ Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2008) hlm. 65

²⁷ Surmayadi, Nyoman I. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Citra Utama. 2005) hlm.79

pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Schenider menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi, yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*Theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*). Pada inិតinya, implementasi merupakan suatu kegiatan untuk memberikan output kebijakan yang dilakukan oleh implementor kepada penerima manfaat atau kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.²⁸

2.2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.²⁹

Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi dalam proses kebijakan publik sebagaimana

²⁸ Erwan agus purwanto dan Dyah Rati Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Gave Media. 2015) hlm.19

²⁹ Winarno, Budi. (2016). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 2016) hlm. 134

disebutkan oleh Pasolong yang mengutip pendapat James Anderson bahwa proses dari kebijakan publik terdiri dari formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.³⁰

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan. Sehingga implementasi kebijakan terdiri dari unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berikut ini merupakan beberapa konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dalam keseluruhan proses kebijakan, sebab dalam implementasi kebijakan ini merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting, maka tidak jarang dalam implementasi kebijakan terdapat banyak hal – hal krusial. Pengertian implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

³⁰ Pasolong, H.(2011). *Teori Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta. 2011) hlm 41

*peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”*³¹

Maksud dari pengertian implementasi tersebut apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuatkan dalam suatu bentuk positif seperti undang – undang atau peraturan lainnya dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Van Meter Van Horn yang dikutip oleh Wahab, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

*“Those actions by public individu (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”. (“Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”).*³²

Definisi diatas memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini pada suatu saat berusaha untuk

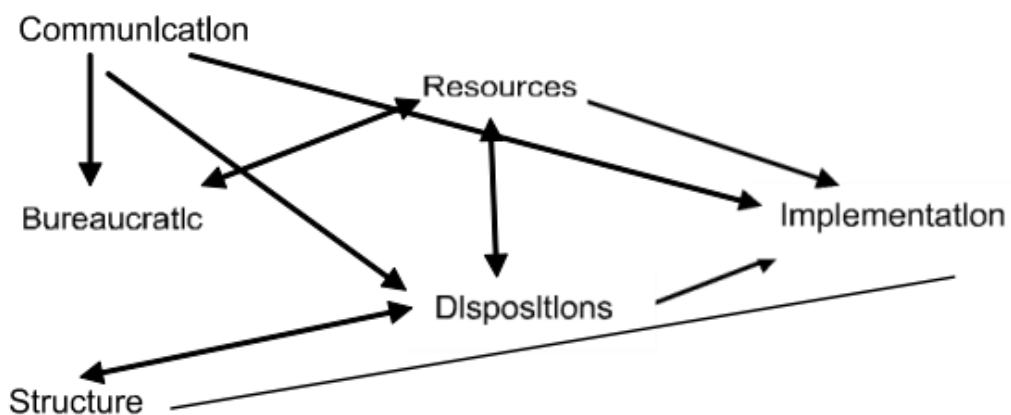
³¹ Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta. 2008) hlm. 139.

³² Wahab, Solichin 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2008) hlm. 65.

mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Model implementasi George Edward III (1980, 1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan beureucratic structures*.³³

Gambar 2.1. Model Implementasi Edward III



Sumber: Nuryanti Mustari (2015:165)

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur

³³ Nuryanti Mustari. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio. 2015) hlm. 165

organisasi pelaksana kebijakan. Edward menyebutkan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur faktor komunikasi. Indikator tersebut antara lain :

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-levelbureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Resources berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi, Edward menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan. Menurut Edward dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan *standar operating procedures* (SOPs) dan pelaksanaan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.³⁴

³⁴ Ibid: hlm. 166-168

2.3. Konsep Ekologi Pemerintahan

Sejarah lahirnya studi ekologi yang dapat diintisarikan sebagai berikut. Studi ekologi modern dikembangkan pada awal abad ke-17 oleh Antoni Van Leewenhoek dan Richard Bradley yang dapat dikatakan merupakan tokoh perintis. Selain itu terdapat Alexander Von Humbolt yang juga mengembangkan pemikiran mengenai ekologi sebagai bagian dari ilmu biologi yang kemudian berkembang memasuki bidang-bidang lainnya, salah satunya adalah bidang ilmu sosial. Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu soaial kemudian mengadopsi konsep, teori, paradigma maupun hokum yang berkembang dalam ilmu ekologi, dengan asumsi bahwa pemerintahan sebagai sebuah sistem pada dasarnya adalah sebuah organisme hidup (living organism) yang lahir, hidup, berkembang dan ada kemungkinan kemudian akan mati atau digantikan oleh sistem yang lainnya. berdasarkan asumsi tersebut kemudian dikembangkan kajian tentang ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan muncul karena adanya gejala dan peristiwa pemerintahan yang silih berganti dan dinamis selama bertahun-tahun. Selanjutnya, kinerja pemerintahan tersebut dinilai kemudian dan dibandingkan dengan negara lain.³⁵

Otto Soemarwoto mengatakan bahwa ekologi adalah berinteraksi pula dengan bidang-bidang lainnya, sehingga memunculkan ekologi pembangunan, ekologi kependudukan, ekologi pangan, ekologi pariwisata, serta bidang-bidang lainnya yang menggambarkan adanya interaksi dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah sebuah

³⁵ Sadu Wasistiono. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. (Jatinangor: IPDN Press. 2013) hlm.37

organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang, dan dapat mati. Oleh karena itu, gejala dan peristiwa pemerintahan dapat dianalisis dengan kajian ekologi.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan, mengurus kesejahteraan rakyat, dan pembangunan masyarakat dengan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam negara. Pemerintahan merupakan sebuah sistem yang dinamis di mana perubahan lingkungan terjadi dengan sangat cepat dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, perlu suatu ilmu yang mempelajari interaksi komponen pembentuk sistem pemerintahan dengan lingkungannya, baik dalam segi internal maupun eksternalnya. Pada hakikatnya, permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan ekologi. Berkembangnya lingkungan secara dinamis dan sulit diprediksi menimbulkan pemikiran di mana perlu adanya ilmu yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya termasuk cara beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

2.4. Sampah

Menurut Twardoska, Allen, Kettrup, dan Lacy sampah merupakan substansi atau objek yang dibuang seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

*“Wastes are substances or objects which are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of national law.”*³⁶

Sedangkan menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu

³⁶ Twardoska I., Allen H.E., Kettrup A.A.F and Lacy W.J. 2004. Solid waste: Assessment, monitoring and remediation. Elsevier, Vol 4. 173-205.

yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.³⁷ Maka dari itu segala sesuatu yang sudah tidak diinginkan oleh masyarakat serta tidak disenangi dan dibuang termasuk dalam kategori sampah.

Penjelasan mengenai sampah dijelaskan lebih lanjut oleh Mukono dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1. *Garbage* merupakan jenis sampah yang terdiri dari sisa potongan hewan atau sayur-sayuran yang berasal dari proses pengolahan, persiapan, pembuatan, dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari bahan yang mudah membusuk, lembab, dan mengandung sejumlah air.
2. *Rubbish* sampah jenis ini merupakan sampah yang mudah atau susah terbakar, berasal dari rumah tangga, pusat perbelanjaan, dan kantor. Sampah yang mudah terbakar umumnya terdiri dari zat organik, kertas, sobekan kain, kayu, dan plastik. Sedangkan sampah yang sukar terbakar sebagian besar merupakan zat anorganik seperti logam, mineral, kaleng, dan gelas.
3. *Ashes* merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, kantor, maupun Industri.
4. *Street Sweeping* merupakan sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran, dan daun-daunan.
5. *Dead Animal* Yaitu bangkai hewan yang mati karena bencana alam, penyakit, ataupun kecelakaan.

³⁷ Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. (Jakarta. EGC. 2006) hlm.

6. *Household Refuse* . Merupakan sampah campuran yang terdiri dari rubbish, garbage, dan ashes yang berasal dari perumahan
7. *Abandoned Vehicles* Yaitu sampah yang berasal dari bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut, dan alat transportasi lainnya.
8. Sampah Industri Terdiri dari sampah padat yang berasal dari proses indudtri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, dan industri lainnya.
9. *Demolition Wastes* Merupakan sampah yang berasal dari perombakan gedung atau bangunan.
10. *Construction Wastes* Yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. Sampah dari daerah ini mengandung tanah, batubatuan, potongan kayu, alat perekat, dinding, dan kertas.
11. *Sewage Solid* Merupakan sampah yang terdiri dari benda kasar yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pengolahan air buangan.³⁸

2.5. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah

³⁸ Mukono HJ. (2006). Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. (Surabaya: Airlangga University Press. 2006) hlm.78

kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Alfiandra menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

1. Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode tertentu.
2. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA)
3. Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.³⁹

³⁹ Alfiandra. *Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur*, (Semarang. Universitas Diponegoro. 2009) hlm.25

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan.

Hermawati menjelaskan bahwa dalam operasional pengelolaan atas sampah maka dilakukan beberapa unsur utama kegiatan yang dimulai dari:

1. Pewadahan sampah

Kompartemen adalah metode untuk membuang sampah secara singkat pada sumbernya, baik sampah yang dihasilkan oleh manusia maupun secara kolektif, baik yang bersifat sementara maupun yang sangat tahan lama, seperti TPA. Sebaiknya tempat sampah diubah sesuai dengan jenis sampahnya (bahan alam atau anorganik atau tidak aman) sehingga pengelolaan selanjutnya menjadi lebih sederhana, terutama untuk tujuan akhir penggunaan kembali..

2. Pengumpulan sampah

Pemilahan dari pengumpulan sampah dilakukan dari sumber utama untuk dikirim ke tempat sementara, atau ke tempat penanganan limbah, atau langsung ke tempat penanganan terakhir tanpa melalui siklus pertukaran. Jangka waktu dan sistem proses pemilahan sampah bervariasi mulai dari satu kota besar atau dari satu daerah ke daerah berikutnya.

3. Pemindahan sampah

Pemindahan sampah merupakan cara paling umum untuk pindah dari berbagai lokasi penanganan terakhir. Biasanya, pembuangan sampah di

daerah perkotaan besar dilakukan oleh petugas sampah yang menggunakan peralatan manual atau mekanikal, atau justru gabungan.

4. Pengangkutan

Pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengangkut. Di daerah Permukiman, pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau truk kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: truk, dump truk, compactor truk, multi *loader, crane*, dan mobil penyapu jalan.

5. Proses akhir

Pemrosesan akhir sampah (termasuk pemanfaatan sampah untuk berbagai tujuan). Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku di daerah tersebut.⁴⁰

2.6. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan serta bahan bacaan dalam menganalisa dan mengevaluasi penelitian, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang menggunakan topik yang sama dengan kajian ini. Dalam kajian ini, ada sebelas penelitian sejenis terdahulu yang akan penulis cantumkan sebagai bahan pertimbangan. Penelitian terdahulu yang sejenis dengan kajian ini yaitu penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah dengan metode penelitian kualitatif.

⁴⁰ Wati Hermawati, dkk. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan. (Yogyakarta : Plantaxia. 2015) hlm.5

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Carlito da Costa (2018) yang berjudul, Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang). Penelitian ini mengkaji sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dalam upaya menciptakan kota yang berkelanjutan. Metode Penelitian dilakukan secara yuridis empiris sosiologis yaitu data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang dianalisis dengan undangundang terkait. Pertanyaan utama yang ingin dijawab (1) Apakah sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dapat berkontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan (2) Apakah pengelolaan sampah di Kota Semarang telah dilakukan secara berwawasan lingkungan (3) Faktor penghambat terwujudnya sistem pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dan solusi yang ditawarkan. Adapun persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah; penelitian membahas mengenai pengelolaan sampah, menggunakan metode kualitatif dan menggunakan UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai bahan analisis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan, karena dengan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan akan terciptanya lingkungan yang baik. (2) Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum optimal dengan cara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), sehingga perlu dilakukan penyediaan lahan TPA, transportasi, pendanaan, investor dan peningkatan partisipasi masyarakat. (3) Hambatannya yaitu faktor jumlah penduduk, Kualitas

dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, faktor oprasional. Solusinya yaitu mengadakan pelatihan bagi pegawai, menambah jumlah armada dan kontainer.⁴¹

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Paramita Adhinul Putra (2016) yang berjudul Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan sesayap kabupaten tana tidung. Persamaan penelitian ini dengan peneletian oleh peneliti adalah Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori implementasi kebijakan dan uu no 18 tahun 2008. Sedangkan perbedaannya ialah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan sudah direalisasikan, kendati hasil sepenuhnya belum efektif. Pada aspek organisasi, pemerintah tana tidung harus segera Menyusun penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Disamping itu, dinas PU dan perhubungan sebagai pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga harus meningkatkan koordinasi antar Lembaga. Pada aspek interpretasi, dinas PU dan perhubungan perlu mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian gaji pada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Pada aspek aplikasi dinas PU dan perhubungan perlu segera membangun tempat pembuangan akhir yang sesuai dengan standar kriteria menurut UU NO 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.⁴²

⁴¹ Carlito da Costa. (2018). Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan (Studi Tentang Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang). Tesis: Unissula Semarang.

⁴² Paramita Adhinul Putra. (2016). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Tesis: UT.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Devi Mulyasari (2019) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III yang mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan dapat ditentukan oleh 4 faktor yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Perbedaannya ialah penelitian ini tidak menganalisis dengan uu no 18 tahun 2008 melainkan berdasarkan Peraturan Daerah no 15 tahun 2012 asal 44 ayat 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Rancaekek belum berjalan dengan optimal, hal ini ditandai dengan masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mengelola sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan kembali, masih kurangnya armada yang dibutuhkan serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan dan juga pihak terkait hanya menjalankan instruksi dari pihak Pemerintah Kecamatan. Hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Rancaekek yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga lingkungan di sekitar serta masih buruknya kebiasaan “oknum” masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.⁴³

⁴³ Devi Mulyasari. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Jurnal Admistrasi Negara, Vol. 13, No. 1, 1-15

Penelitian ke empat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Petronela Dea Sari (2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihat dari karakteristik masalah karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dari perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Sedangkan persamaannya ialah metode penelitian yang digunakan dan menganalisis berdasarkan salah satunya uu no 18 tahun 2008. Hasil penelitian ini ialah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan : 1) Dari segi komunikasi dan koordinasi, minimnya sosialisasi dan koordinasi, serta pengawasan dan pembinaan menjadi faktor utama baik dari segi aparat dinas dan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup belum memberikan sosialisasi dan koordinasi secara merata, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. 2) Dari segi sumber daya pelaksana, sumber daya manusia yang di miliki UPT belum memadai karena masih banyak pekerja yang

belum bekerja sesuai dengan jurusan dan belum ada petugas khusus untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, selain itu sarana dan prasarana yang diberikan oleh dinas juga belum memadai masih banyak TPS-TPS yang belum mendapat fasilitas yang cukup terutama bagi para pekerja di TPS, ini merupakan hambatan yang bisa menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Perda tentang Pengelolaan Sampah ini. 3) dari segi SOP, walaupun Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki SOP namun Dinas Lingkungan Hidup menjadikan Perda sebagai acuan dalam menjalankan tugas, sedangkan UPT sudah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP tentang Pengelolaan Sampah.⁴⁴

Penelitian kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017), meneliti tentang analisis implementasi pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakatnya dalam pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan pengelolaan sampah dalam meningkatkan kebersihan di Kota Metro belum semua berjalan sesuai dengan peraturan daerah dan masyarakat belum mematuhi aturan pembuangan sampah. Amalia menyarankan Pemerintah Daerah wajib menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dan agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat.⁴⁵

Penelitian keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Doltianus, Masjaya, dan Kalalinggi (2016), meneliti tentang analisis implementasi

⁴⁴ Petronela Dea Sari. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. STPMD.

⁴⁵ Nesya Amalia. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Meningkatkan Kebersihan Di Kota Metro*. Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS), Jilid 2, No.1, Juni Tahun 2017.

pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan implementasi pengelolaan sampah sudah sesuai mekanisme yang ditetapkan tetapi secara faktual kurang efektif. Doltianus, Masjaya, dan Kalalinggi menyarankan mengembangkan kerjasama vertikal-eksternal, mengoptimalkan dukungan Dunia Usaha melalui program CSR, Meningkatkan teknologi pengolahan sampah.⁴⁶

Penelitian ketujuh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Rosdiana (2016), meneliti tentang pengukuran keberhasilan implementasi pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan Dinas Kebersihan dan pertamanan kota Surabaya melakukan inovasi pengolahan sampah dengan sistem transportasi pengangkutan sampah (*System Waste Transportation*) dan pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kurniawan dan Rosdiana menyarankan perlu adanya sosialisasi peraturan, penyesuaian jumlah sumber daya manusia dengan beban kerja, peningkatan komitmen untuk penciptaan inovasi pengolahan sampah dan perlu adanya perluasan komunikasi antar organisasi.⁴⁷

Penelitian kedelapan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Habsari (2015), meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi peraturan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah

⁴⁶ Doltianus, Masjaya, dan Kalalinggi. (2016). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform (JAR)* Jilid 4, No 1 2016.

⁴⁷ Kurniawan dan Rosdiana. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik (Publika)* Jilid 4 Nomor 9 2016

kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan dalam penanganan sampah sudah sesuai dengan Perda yang ada akan tetapi masyarakat masih ada yang melanggar larangan sampah pembuangan sampah sembarangan. Habsari menyarankan perlunya adanya saling kerjasama antara pihak Kelurahan, RT dan masyarakat; perlu didirikan baleho di jalan raya yang dapat memotivasi masyarakat untuk sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar; perlu adanya pengawasan secara langsung untuk menindak masyarakat yang diketahui dan tertangkap tangan sedang membuang sampah sembarangan; dan diharapkan pihak pemerintah harus lebih memperhatikan atau menambah anggaran dana operasional pengelolaan sampah.⁴⁸

Penelitian kesembilan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Febiana (2019), meneliti tentang pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai peraturan yang ada. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan kekurangan sarana dan prasarana menjadi hambatan dan kekurangan teknologi mempengaruhi efektifitas pengolahan sampah. Febiana menyarankan melibatkan pihak ketiga seperti *corporate social responsibility* (CSR) dari swasta untuk menopang kekurangan dalam pengelolaan sampah.⁴⁹

⁴⁸ Habsari. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. e-Journal Ilmu Komunikasi, Volume 3, Nomor 4, 2014: 225-239

⁴⁹ Febiana. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung). Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 Januari 2019